

Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Tangerang Dalam Menghadapi Ancaman Kelangkaan Pangan

Sumarlin¹ I Wayan Warka² Agus Adriyanto³

Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Kawasan IPSC Sentul, Sukahati, Kec. Citeureup,
Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Indonesia^{1,2,3}

Email: marrlin47@gmail.com¹

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pertahanan laut dalam menghadapi ancaman kelangkaan pangan di daerah pesisir Tangerang. Dalam konteks perubahan iklim dan ancaman tenggelam yang dihadapi oleh daerah pesisir Indonesia, Kabupaten Tangerang memiliki potensi fiskal yang memadai untuk memandirikan daerahnya dan meningkatkan pembangunan ekonomi. Strategi pertahanan laut menjadi krusial dalam menjaga keberlanjutan pasokan pangan di daerah tersebut. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini mengumpulkan data melalui studi literatur, wawancara dengan para ahli, dan analisis kebijakan terkait pertahanan laut dan kelangkaan pangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa strategi pertahanan laut yang efektif membutuhkan kerja sama antara pemerintah daerah, lembaga pemerintah terkait, sektor swasta, dan masyarakat setempat. Rekomendasi strategi meliputi pengembangan budidaya perikanan dan akuakultur berkelanjutan, pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan, infrastruktur pesisir yang tangguh terhadap perubahan iklim, dan peningkatan kesadaran masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis aspek hukum terkait strategi pertahanan laut di Indonesia. Undang-undang seperti Undang-Undang Kelautan dan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menjadi dasar hukum dalam pengembangan strategi pertahanan laut. Namun, implementasi dan penegakan hukum yang efektif masih perlu ditingkatkan untuk melindungi sumber daya laut dan menghadapi ancaman kelangkaan pangan. Kesimpulannya, strategi pertahanan laut merupakan pendekatan penting dalam menghadapi ancaman kelangkaan pangan di daerah pesisir Tangerang. Kerja sama lintas sektor, kebijakan yang tepat, dan peran hukum yang kuat sangat diperlukan dalam mencapai tujuan keberlanjutan pangan. Penelitian ini memberikan wawasan dan rekomendasi yang bermanfaat bagi pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan terkait dalam menghadapi ancaman kelangkaan pangan di daerah pesisir Tangerang.

Kata Kunci: Infrastruktur, Pesisir, Kesadaran Masyarakat, Hukum Kelautan

Abstract

This study aims to analyze the marine defense strategy in facing the threat of food scarcity in the coastal area of Tangerang. In the context of climate change and the threat of drowning faced by Indonesia's coastal areas, Tangerang Regency has sufficient fiscal potential to make the region self-reliant and promote economic development. The maritime defense strategy is crucial in maintaining the sustainability of the food supply in the area. Using a qualitative approach, this research collects data through literature studies, interviews with experts, and analysis of policies related to maritime defense and food scarcity. The results of the analysis show that an effective sea defense strategy requires cooperation between local governments, relevant government agencies, the private sector, and local communities. Strategy recommendations include the development of sustainable aquaculture and aquaculture, sustainable management of marine resources, climate change resilient coastal infrastructure, and increased public awareness. In addition, this study also analyzes legal aspects related to maritime defense strategy in Indonesia. Laws such as the Maritime Law and Government Regulations concerning the Management of Coastal Zone and Small Islands form the legal basis for the development of a maritime defense strategy. However, effective law implementation and enforcement still needs to be improved to protect marine resources and face the threat of food scarcity. In conclusion, the marine defense strategy is an important approach in dealing with the threat of food scarcity in the coastal area of Tangerang. Cross-sectoral cooperation, appropriate policies, and a strong legal role are needed in achieving the goal of food sustainability. This research provides useful

insights and recommendations for policy makers and relevant stakeholders in dealing with the threat of food scarcity in the coastal area of Tangerang.

Keywords: Infrastructure, Coast, Citizen's Awareness, Maritime Law



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Kabupaten Tangerang, yang terletak di Provinsi Banten, memiliki keuntungan dalam hal potensi fiskal yang cukup untuk memajukan daerahnya secara mandiri. Dengan posisi geografisnya yang berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta, yang merupakan pusat pemerintahan dan ekonomi Indonesia, seharusnya menjadi nilai tambah dalam upaya meningkatkan pembangunan ekonomi. Pesisir Tangerang merupakan wilayah yang memiliki potensi maritim yang kaya, dengan sumber daya laut yang melimpah. Namun, seperti banyak daerah pesisir lainnya di Indonesia, Tangerang juga menghadapi berbagai tantangan terkait kelangkaan pangan. Kelangkaan pangan dapat menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan dan kestabilan masyarakat setempat. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan strategi pertahanan laut yang efektif untuk menghadapi masalah kelangkaan pangan di daerah tersebut (Nizar, 2018).

Strategi pertahanan laut adalah serangkaian tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara untuk melindungi kepentingan nasionalnya di wilayah laut. Ini melibatkan penggunaan sumber daya militer, diplomatik, ekonomi, dan hukum untuk menjaga keamanan dan kedaulatan negara di laut. Strategi pertahanan laut merupakan suatu rangkaian langkah yang dilakukan oleh suatu negara untuk melindungi dan mempertahankan kepentingan nasional di perairan lautnya (Prihantoro & Swastanto, 2021). Dalam konteks Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, pertahanan laut menjadi hal yang sangat penting. Dalam hal ini, terdapat beberapa aspek yang relevan dalam strategi pertahanan laut Indonesia. Pertama, landasan hukumnya terdapat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi kekayaan alam Indonesia, termasuk perairan lautnya. Selain itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan menjadi dasar hukum untuk pengelolaan sumber daya kelautan, perlindungan lingkungan laut, serta keamanan dan pertahanan laut di Indonesia (D. A. A. Sari & Muslimah, 2014).

Strategi pertahanan laut Indonesia juga mencakup konsep Pertahanan dan Keamanan Negara (HAN) Laut, yang bertujuan untuk menjaga keutuhan wilayah perairan Indonesia, mencegah ancaman terhadap kedaulatan negara, serta melindungi kepentingan nasional di laut. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia telah menyusun Zona Pertahanan Laut (ZPL) yang mencakup zona pertahanan utama, zona pertahanan baris depan, dan zona pertahanan belakang, dengan tujuan untuk mempertahankan kedaulatan dan keamanan perairan Indonesia. Selain itu, Indonesia juga terus meningkatkan keberadaan dan kualitas Alutsista (Alat Utama Sistem Senjata) Maritim sebagai bagian dari strategi pertahanan laut, dengan mengembangkan dan memperkuat kemampuan pertahanan maritim melalui akuisisi kapal perang, pesawat patroli, radar, dan sistem pertahanan anti-kapal selam. Terakhir, kerjasama regional dan internasional juga menjadi aspek penting dalam strategi pertahanan laut Indonesia, dengan aktifnya Indonesia dalam berpartisipasi dalam forum dan latihan bersama dengan negara-negara tetangga serta menjalin kerja sama dalam pertukaran informasi intelijen maritim (Sutanto et al., 2021).

Pada periode 2009-2011 di Kabupaten Tangerang, terjadi perubahan fungsi lahan seluas 2.043 Ha dengan tingkat penyusutan rata-rata 1.021,5 Ha per tahun. Secara berurutan, lahan

sawah yang mengalami perubahan fungsi terbesar adalah sawah irigasi teknis, tadah hujan, irigasi setengah teknis, dan irigasi sederhana. Perkiraan hingga tahun 2015 menunjukkan bahwa luas lahan sawah yang mengalami perubahan fungsi akan mencapai 5.827 Ha atau 971,2 Ha per tahun, dan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat menjadi faktor penyebab perubahan fungsi lahan sawah di Kabupaten Tangerang. Pertumbuhan penduduk diperkirakan mencapai 1.356.511 jiwa hingga tahun 2015, dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 193,787,28 jiwa per tahun atau 7,73% per tahun. Pertumbuhan penduduk yang tinggi juga berdampak pada peningkatan permintaan akan lahan sawah. Selain itu, pembangunan infrastruktur seperti pasar, pusat perbelanjaan, perumahan, pusat perekonomian, pergudangan, dan daerah perindustrian juga menjadi faktor penarik migrasi penduduk dan berkontribusi pada perubahan fungsi lahan sawah di Kabupaten Tangerang (Masduki, 2014).

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki strategi pertahanan laut yang efektif dalam menghadapi ancaman kelangkaan pangan di daerah pesisir Tangerang. Ancaman tersebut dikaitkan dengan perubahan iklim yang berdampak serius pada pesisir Indonesia, termasuk risiko tenggelamnya wilayah pesisir dan dampaknya terhadap puluhan juta jiwa. Sumber dari Ayomi Amindoni, seorang wartawan BBC News Indonesia pada tanggal 26 Maret 2020, mengonfirmasi bahwa pesisir Indonesia terancam tenggelam dan diperkirakan puluhan juta orang akan terdampak pada masa mendatang. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis strategi pertahanan laut yang dapat membantu mengatasi ancaman kelangkaan pangan di daerah pesisir Tangerang. Dengan memeriksa dan mengintegrasikan temuan dari sumber yang terpercaya ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berharga untuk pemahaman dan pengembangan kebijakan dalam menghadapi tantangan yang dihadapi oleh daerah pesisir Tangerang dan wilayah pesisir Indonesia secara keseluruhan. Penelitian ini akan menjelaskan pentingnya menerapkan strategi pertahanan laut yang efektif di daerah pesisir Tangerang dalam menghadapi ancaman kelangkaan pangan. Penelitian ini juga akan mengkaitkannya dengan kerangka hukum dan undang-undang yang relevan serta kasus yang telah terjadi untuk mendukung analisis dan rekomendasi yang dihasilkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, yang berarti fokus utama penelitian adalah untuk memahami fenomena atau topik yang diteliti dengan mendalam, memeriksa aspek-aspek yang kompleks, dan memahami konteksnya. Pendekatan kualitatif didasarkan pada interpretasi dan pemahaman terhadap data kualitatif, seperti teks, dokumen, wawancara, atau studi pustaka (Abdussamad & SIK, 2021). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka dan analisis kebijakan terkait pertahanan laut dan kelangkaan pangan di daerah pesisir Tangerang. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami isu-isu yang terkait dengan strategi pertahanan laut dan kelangkaan pangan serta untuk menganalisis kebijakan yang telah ada. Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan literatur, jurnal ilmiah, dan publikasi terkait strategi pertahanan laut, kelangkaan pangan, serta kebijakan pemerintah terkait wilayah pesisir Tangerang. Sumber-sumber ini mencakup penelitian-penelitian terkait yang telah dilakukan sebelumnya, kebijakan nasional terkait pertahanan laut dan pangan, serta laporan-laporan terkait isu kelangkaan pangan di daerah pesisir.

Pendekatan kualitatif melalui studi pustaka ini memungkinkan peneliti untuk menggali pemahaman dan wawasan yang lebih dalam mengenai topik penelitian tanpa melakukan pengumpulan data primer. Namun, penting untuk mencatat bahwa penelitian kualitatif melalui studi pustaka memiliki keterbatasan, seperti ketergantungan pada data yang sudah ada dan

kurangnya kontrol langsung atas data yang dikumpulkan (I. N. Sari et al., 2022). Oleh karena itu, peneliti perlu berhati-hati dalam mengevaluasi dan menginterpretasikan data yang ditemukan melalui studi pustaka. Selain itu, analisis kebijakan dilakukan untuk memahami strategi pertahanan laut yang telah diterapkan oleh pemerintah dalam menghadapi ancaman kelangkaan pangan di daerah pesisir Tangerang. Analisis ini melibatkan penelaahan kebijakan-kebijakan terkait yang terkait dengan sumber daya laut, budidaya perikanan, pengawasan kegiatan penangkapan ikan, serta pembangunan infrastruktur pendukung.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kelangkaan pangan di daerah pesisir Tangerang dapat dijelaskan oleh beberapa faktor. Pertama, perubahan iklim seperti peningkatan suhu laut, curah hujan yang tinggi, dan perubahan pola musim dapat berdampak negatif pada produktivitas perikanan dan pertanian pesisir, mengurangi produksi pangan dan meningkatkan risiko kelangkaan. Kedua, praktik penangkapan ikan yang berlebihan atau overfishing dapat menyebabkan penurunan populasi ikan dan merusak ekosistem laut, mengurangi ketersediaan pangan laut yang penting bagi masyarakat pesisir. Ketiga, pencemaran laut akibat limbah industri, pertanian, dan domestik juga mempengaruhi kualitas pangan laut yang dikonsumsi oleh masyarakat, menyebabkan masalah kelangkaan pangan. Terakhir, pertumbuhan populasi yang cepat di daerah pesisir Tangerang meningkatkan permintaan pangan sementara sumber daya pangan terbatas, sehingga memunculkan risiko kelangkaan jika tidak ada pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut yang efektif.

Perkembangan Kabupaten Tangerang sebagai daerah penyangga dan satelit DKI Jakarta telah mengubah struktur perekonomiannya menjadi sektor industri dan jasa. Hal ini menyebabkan jumlah penduduk di Kabupaten Tangerang terus meningkat dari tahun ke tahun, karena banyak orang yang mencari pekerjaan atau tempat tinggal di daerah tersebut. Seiring dengan pertumbuhan penduduk, kebutuhan akan beras sebagai salah satu sumber pangan utama juga terus meningkat. Produksi padi sawah di Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan sebesar 57.257 Ton GKG atau 14,54% pada periode tahun 2009-2010. Hal ini disebabkan oleh pemanfaatan teknologi pertanian yang baik serta sosialisasi cara bertanam yang efektif oleh dinas pertanian dan peternakan Kabupaten Tangerang. Namun, antara tahun 2010-2011 terjadi penurunan produksi padi sawah sebesar 12.890 Ton GKG atau 2,85% (Nizar, 2018).

Setelah dilakukan konversi dari gabah kering giling menjadi beras, terjadi peningkatan produksi beras sebesar 35.923 ton atau 14,54% pada tahun 2009-2010. Namun, pada tahun 2010-2011 terjadi penurunan produksi beras sebesar 8.087,62 ton atau 2,86%. Jika dilihat dari data tahun 2009-2011, terjadi kenaikan produksi beras sebesar 27.835,38 ton atau 11,27%. Bila dibandingkan dengan kebutuhan beras, produksi beras yang dihasilkan oleh Kabupaten Tangerang masih jauh lebih rendah. Rata-rata kekurangan beras yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah sebesar 321.366 ton atau 18,16%. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus membeli beras dari daerah penghasil beras lain seperti Cianjur, Subang, Karawang, dan sebagainya. Jika kebutuhan beras dapat dipenuhi secara mandiri, anggaran yang sebelumnya digunakan untuk pembelian beras dari daerah lain dapat dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih luas (Masduki, 2014).

Untuk mengatasi kelangkaan pangan di daerah pesisir Tangerang, diperlukan kerangka hukum dan undang-undang yang memadai (D. A. A. Sari & Muslimah, 2014). Beberapa undang-undang yang relevan dan dapat terkait dengan strategi pertahanan laut dalam menghadapi ancaman kelangkaan pangan di daerah tersebut adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, yang menekankan pengelolaan laut yang

berkelanjutan dan pemanfaatan sumber daya kelautan secara berkelanjutan (Prakoso et al., 2022). Undang-undang ini harus menjadi acuan dalam strategi pertahanan laut. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam juga penting, karena mengatur perlindungan dan pemberdayaan nelayan serta pembudidaya ikan dan petambak garam (Prihantoro & Swastanto, 2021). Selain itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lingkungan Hidup juga relevan, karena memberikan dasar hukum untuk melindungi lingkungan hidup termasuk laut dan ekosistem pesisir, yang berperan penting dalam mencegah pencemaran laut yang dapat mempengaruhi kualitas pangan laut yang dikonsumsi oleh masyarakat pesisir (Ahadin, n.d.).

Ketahanan pangan merujuk pada situasi di mana terdapat cukup pasokan pangan bagi setiap individu, di setiap waktu, dengan akses yang memadai baik secara fisik maupun ekonomi (Sarjito et al., 2019). Fokus ketahanan pangan tidak hanya pada penyediaan pangan di tingkat regional, tetapi juga pada ketersediaan dan konsumsi pangan di tingkat lokal dan rumah tangga, serta pemenuhan kebutuhan gizi individu. Salah satu indikasi kebijakan pemerintah terkait ketahanan pangan dapat dilihat melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa ketahanan pangan mencakup kondisi di mana rumah tangga memiliki pasokan pangan yang mencukupi, baik dari segi jumlah maupun mutu, serta aman, merata, dan terjangkau. Upaya pemerintah dalam mengatasi ketahanan pangan juga terlihat melalui dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2006 yang membentuk Dewan Ketahanan Pangan.

Strategi dalam mengatasi kelangkaan pangan melalui pertahanan laut, yang sesuai dengan undang-undang di Indonesia, mencakup beberapa langkah penting. Pertama, perlu dilakukan pengelolaan sumber daya kelautan secara berkelanjutan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Hal ini melibatkan pemantauan dan pengendalian yang ketat terhadap aktivitas penangkapan ikan, penanaman kembali terumbu karang, serta perlindungan terhadap ekosistem laut secara keseluruhan (Indrawan & Efriza, 2018). Selanjutnya, langkah penting lainnya adalah melaksanakan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016. Undang-undang ini menekankan pentingnya memberikan perlindungan dan dukungan kepada para pelaku usaha di sektor perikanan, termasuk nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam. Dalam konteks pertahanan laut, langkah ini bertujuan untuk mengurangi praktik penangkapan ikan yang berlebihan atau overfishing, serta melindungi mata pencaharian masyarakat pesisir.

Selain itu, perlunya melaksanakan undang-undang terkait perlindungan lingkungan hidup juga menjadi strategi yang relevan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lingkungan Hidup memberikan dasar hukum untuk melindungi lingkungan hidup, termasuk laut dan ekosistem pesisir. Langkah-langkah yang dapat diambil dalam konteks ini adalah mencegah pencemaran laut akibat limbah industri, pertanian, dan domestik yang dapat mempengaruhi kualitas pangan laut yang dikonsumsi oleh masyarakat pesisir.

Secara keseluruhan, strategi kelangkaan pangan dalam pertahanan laut yang sesuai dengan undang-undang di Indonesia melibatkan pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan, perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam, serta perlindungan lingkungan hidup. Implementasi strategi ini akan membantu mengatasi masalah kelangkaan pangan di daerah pesisir, memastikan ketersediaan pangan yang cukup bagi masyarakat, serta menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan yang menjadi sumber utama pangan pesisir.

KESIMPULAN

Dalam upaya mengatasi kelangkaan pangan melalui pertahanan laut sesuai dengan undang-undang di Indonesia, diperlukan strategi yang komprehensif. Kesimpulannya, strategi-strategi yang penting meliputi pengelolaan sumber daya kelautan secara berkelanjutan, perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam, serta perlindungan lingkungan hidup. Implementasi strategi ini akan berkontribusi dalam memastikan ketersediaan pangan yang cukup bagi masyarakat pesisir, melindungi sumber daya kelautan, dan menjaga keberlanjutan ekosistem laut. Dengan demikian, langkah-langkah ini dapat membantu mengatasi kelangkaan pangan dan menjaga ketahanan pangan di daerah pesisir Tanggerang, serta memenuhi tujuan undang-undang yang terkait dengan pertahanan laut dan keberlanjutan sumber daya pangan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Sekolah Pertahanan Kelautan, Universitas Pertahanan Indonesia, atas bantuan yang berharga dalam menjalankan penelitian dan analisis yang telah menghasilkan penulisan ini dengan kualitas yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, H. Z., & SIK, M. S. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. CV. Syakir Media Press.
- Ahadin, M. (n.d.). *Kepentingan Pemerintah Indonesia Mendukung Pengelolaan Sumber Daya Laut Yang Berkelanjutan Dalam Kerja Sama Indian Ocean Rim Assosiation (Iora) Periode 2015-2019*. Fisip UIN Jakarta.
- Indrawan, R. M. J., & Efriza, E. (2018). Membangun Komponen Cadangan berbasis Kemampuan Bela Negara sebagai Kekuatan Pertahanan Indonesia Menghadapi Ancaman Nir-Militer. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 8(2), 21–40.
- Masduki, U. (2014). Sektor ekonomi potensial di kota tangerang selatan. *Liquidity: Jurnal Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 3(2), 183–189.
- Nizar, N. I. (2018). Analisis Perekonomian dan Potensi Ekonomi Kreatif Tangerang Selatan. *Jurnal Mandiri: Ilmu Pengetahuan, Seni, Dan Teknologi*, 2(1), 87–107.
- Prakoso, L. Y., Yulivan, I., Purwantoro, S. A., Prihantoro, K., Suhirwan, S., Uksan, A., Alubaroq, H. Z., Sutanto, R., & Pramono, B. (2022). Implementasi Pengembangan Persenjataan Angkatan Laut Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 519–526.
- Prihantoro, M., & Swastanto, Y. (2021). Penanganan Pandemi Covid-19 oleh Pemerintah RI Ditinjau dari Strategi Pertahanan Nirmiliter. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 11(1), 31–48.
- Sari, D. A. A., & Muslimah, S. (2014). Kebijakan Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar Indonesia Dalam Menghadapi Perubahan Iklim Global. *Yustisia Jurnal Hukum*, 3(3), 57–72.
- Sari, I. N., Lestari, L. P., Kusuma, D. W., Mafulah, S., Brata, D. P. N., Iffah, J. D. N., Widiatsih, A., Utomo, E. S., Maghfur, I., & Sofiyana, M. S. (2022). *Metode penelitian kualitatif*. UNISMA PRESS.
- Sarjito, A., Ali, Y., & Wijaya, A. F. (2019). Efektivitas Kebijakan Minimum Essential Force Komponen Utama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. *Manajemen Pertahanan: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Manajemen Pertahanan*, 4(2).
- Sutanto, R., Isjarvin, D., & Almubariq, H. Z. (2021). Dinamika Alutsista TNI AL Komponen Utama Kekuatan Maritim. *Jurnal Maritim Indonesia (Indonesian Maritime Journal)*, 9(3), 223–233.